

Policy Brief



Collaborative Partnership Untuk Mengembangkan Ekowisata Berbasis Komunitas di *Gedong Pass*

EXECUTIVE SUMMARY

Ekowisata berbasis komunitas menjadi pilihan yang tepat untuk model pengelolaan Gedong Pass yaitu ekowisata di Dusun Gedong, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, mengingat sebagian besar penduduk di Dusun Gedong adalah petani miskin dan memiliki pendidikan rendah (tidak ada yang bergelar sarjana), nilai-nilai budaya pedesaan Jawa masih dipegang teguh menjadi perekat kohesi dan harmoni sosial. Motivasi warga setempat untuk mengejar kepentingan ekonomi belum muncul. Model pariwisata yang berorientasi pada pariwisata massal (*mass tourism*) dapat merusak ketentraman dan keutuhan masyarakat serta mempengaruhi keseimbangan lingkungan alam.

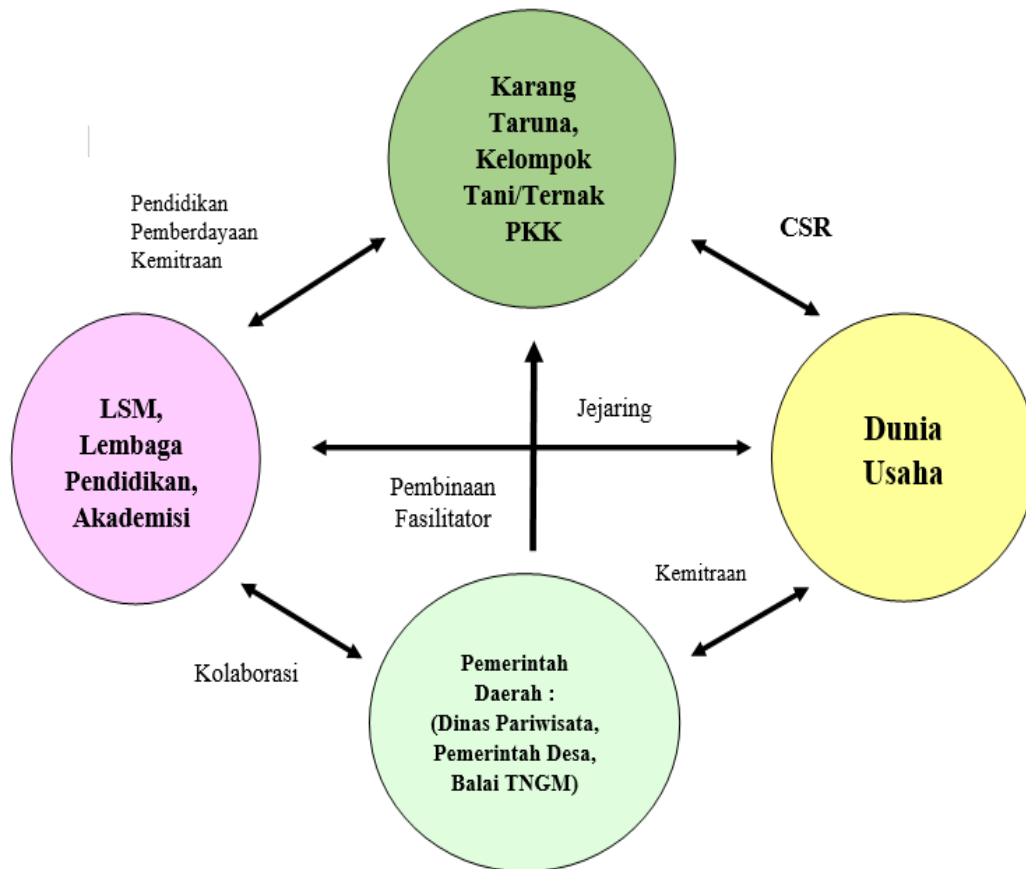
Dalam rangka mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, perlu melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, dan lembaga masyarakat yang bermitra untuk mencapai tujuan bersama atau *collaborative partnership*. Model *collaborative partnership* diyakini dapat menyelesaikan beberapa masalah atau kendala yang teridentifikasi, yaitu: (1) tidak ada pemetaan situasi, potensi dan masalah (2) tidak ada pengelolaan pariwisata yang profesional, dan (3) tidak ada pemangku kepentingan (pemerintah, jaringan kemitraan) dalam pengelolaan kegiatan pariwisata antara pihak swasta) dan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, sangat penting untuk mengkaji bagaimana menjalin kemitraan untuk mendukung pengembangan ekowisata di masyarakat Dusun Gedong.

A. PENGEMBANGAN MODEL *COLLABORATIVE PARTNERSHIP*

Mengembangkan model kemitraan kolaboratif membutuhkan informasi tentang peran, kepentingan dan kekuasaan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui kegiatan analisis *stakeholder*. Berdasarkan analisis stakeholder dapat diidentifikasi *stakeholders* yang memegang peran penting dalam pengembangan ekowisata Gedong Pass yaitu : aktor dari kelembagaan komunitas Dusun Gedong,

kelembagaan masyarakat, kelembagaan pendidikan, kelembagaan bisnis, dan kelembagaan pemerintah daerah/desa. Stakeholder primer atau kelompok yang berkepentingan atau terdampak langsung dengan pengembangan ekowisata Gedong Pass adalah warga Dusun Gedong; Stakeholder sekunder adalah pihak-pihak yang menaruh perhatian pada pemberdayaan masyarakat di Dusun Gedong yakni mahasiswa KKN UNS, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dan pihak yang mempunyai kepentingan bisnis dengan warga Dusun Gedong. Stakeholder kunci adalah pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas yang bertanggungjawab pada pengembangan pariwisata dan pihak pengelola Balai Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai lembaga pengelola kawasan hutan lindung yang menjadi lokasi wisata Gedong Pass. Hasil riset menemukan bahwa masing-masing stakeholder belum mampu membangun kemitraan yang mensinergikan sumber daya yang ada di tiap-tiap stakeholder.

Model *Collaborative Partnership* mensyaratkan aktor-aktor di kelembagaan masyarakat, pemerintah, dan bisnis meskipun memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun mampu saling melengkapi dan bersinergi bersama untuk mengembangkan ekowisata di Gedong Pass. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ditemukan di lapangan maka riset ini merumuskan model sebagai berikut :



Gambar 1. Model Collaborative Partnership Untuk Mengembangkan Ekowisata Berbasis Komunitas di Gedong Pass

B. UJI COBA MODEL

Model yang telah dikembangkan perlu diujicobakan untuk mengetahui sejauhmana model tersebut dapat mendukung pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Dusun Gedong. Langkah-langkah dalam uji coba model adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) stakeholder.

Pemetaan dan intervensi stakeholder dilakukan untuk mengetahui siapa saja stakeholder yang bisa mendukung atau menghambat keberhasilan ekowisata G-Pass. Untuk itu perlu memetakan stakeholder sesuai dengan kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka terhadap suatu kebijakan.

Untuk memetakan stakeholder dan mengklasifikasikan sesuai dengan kekuatan (*power*) dan minat (*interest*) mereka terhadap suatu kebijakan, Eden dan Eckerman (dalam Bryson, 2004) merumuskan tehnik pemetaan stakeholder model *Power - Interest Grid* yang membagi stakeholders menjadi 4 kuadran yakni : Kuadran A tipe *Crowd* (lemah dalam *power* serta *interest*), kuadran B tipe *Context setters* (memiliki *power* akan tetapi hanya memiliki *direct interest* yang kecil); kuadran C tipe *Subjects* (stakeholder yang memiliki *interest* tapi dengan *power* yang kecil); dan kuadran D tipe *Players* (stakeholder yang memiliki *power* dan *interest* secara signifikan).

Dari 4 tipe stakeholder yang dikemukakan Eden dan Eckerman (dalam Bryson, 1984) hanya terdapat 3 (tiga) tipe stakeholders dalam pengembangan ekowisata G-Pass yaitu tipe *Subject*, *Context setter* dan *Player*.

- a. *Subject* : Warga Dusun Gedong sebagai stakeholder primer dari sisi *power* mereka lemah karena keterbatasan kapasitas sumber daya ketrampilan, teknologi, finansial maupun kewenangan sehingga dalam dapat dikelompokkan tipe *Subject* yakni stakeholder dengan *interest* tinggi tapi *power* terbatas. Tim mahasiswa KKN UNS sebagai inisiator dan pendamping pengembangan G-Pass dari LSM dan akademisi sebagai stakeholder sekunder mereka memiliki *interest* dalam arti keperdulian yang tinggi terhadap kesejahteraan warga desa, namun dari sisi *power* atau otoritas sangat lemah sehingga masuk dalam tipe *Subject*.
- b. *Context setter* : Kelompok pengusaha meski dari sisi *power* memiliki sumber daya finansial yang besar, namun belum memiliki *interest* kuat untuk berkontribusi dalam pengembangan ekowisata G-Pass sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *Context setter*.
- c. *Player* : Kelembagaan pemerintah - mulai dari tingkat bawah Kepala Dusun dan Desa serta Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang - merupakan aktor yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan ekowisata G-Pass, dan sekaligus memiliki kepentingan (*interest*) dan tanggungjawab meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warga desa sehingga dapat diklasifikasi sebagai *Players* atau stakeholder kunci

Hasil pemetaan stakeholder selanjutnya akan menentukan bentuk intervensi yang perlu dilakukan untuk tiap-tiap stakeholder. Kelembagaan pemerintah sebagai stakeholder kunci (*Player*) belum optimal dalam mendorong pengembangan ekowisata G-Pass karena belum banyak melakukan penguatan

kelembagaan baik dalam bentuk dukungan legal, dukungan fasilitas sarana prasarana maupun pemberdayaan komunitas setempat. Bentuk intervensi bagi stakeholder kunci adalah peningkatan kapasitas dan komitmen politik pejabat daerah untuk menetapkan dasar kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kesejahteraan komunitas setempat.

Kelembagaan masyarakat sipil yakni Tim mahasiswa KKN UNS, akademisi dan lembaga masyarakat merupakan stakeholder tipe *Subject* yakni memiliki keperdulian terhadap pengembangan ekowisata G-Pass, namun tidak mempunyai sumber daya finansial (anggaran) yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas komunitas setempat. Tindakan yang perlu dilakukan untuk *stakeholder* ini adalah memperkuat *power* dengan meningkatkan posisi tawar melalui penguasaan atas sumber daya manusia yang kompeten dalam pendampingan dan penguatan kapasitas warga desa.

Lembaga bisnis termasuk dalam tipe *Context setter* karena meskipun memiliki sumber finansial yang cukup (*power*), namun minat pengusaha masih dalam tahap penjajagan karena orientasi mereka masih berat pada orientasi profit bukan fokus pada pemberdayaan komunitas lokal. Tindakan yang perlu dilakukan untuk stakeholder ini adalah menarik interest mereka pada potensi wisata yang relevan dan kompatibel dengan dunia bisnis, namun tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Masyarakat Dusun Gedong - mulai dari level terbawah RT/RW, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani dan tokoh masyarakat - sebagai penerima manfaat langsung aktivitas ekowisata atau stakeholder primer memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan ekowisata G-Pass. Namun belum seluruhnya mampu berkontribusi secara maksimal.

2. Analisis Jaringan Interaksi Antar Stakeholder

Model *collaborative partnership* membutuhkan dukungan sinergitas antar stakeholder. Untuk mengaplikasikan model ini perlu dipetakan jaringan interaksi antar stakeholder sehingga dapat diidentifikasi potensi keberhasilan dan hambatannya. *Collaborative partnership* menuntut cara berpikir yang menghargai saling interaksi di antara masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, karena itu Kerja Sama dan Konsensus menjadi prinsip yang sangat penting dalam jaringan kemitraan (Gray dan Stites, 2013; Kayser, 2014). Untuk memahami apakah *stakeholder* dalam ekowisata G-Pass bisa mengaplikasikan model yang dikembangkan dipetakan melalui Analisis Jaringan Sumber. Analisis jaringan sumber (AJS) pada dasarnya bertujuan untuk memetakan dinamika interaksi antara sumber internal dan eksternal yang terkait dengan pelanggan dalam rangka mengembangkan rencana interaksi untuk meningkatkan fungsi sosial pelanggan. Dengan AJS akan dapat diketahui interaksi atau hubungan antara sumber-sumber yang ada. Misalnya, bagaimana hubungan antara lembaga sosial lokal dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor. Institusi mana yang terkait erat dengan institusi sosial lokal? Institusi mana yang menurut pelanggan dan penduduk lokal memiliki tingkat/tingkat interaksi yang kuat? Interaksi seperti apa (kerja sama, kompetisi) yang akan terjadi di antara mereka? (Edi Suharto, 2017).

Berdasar hasil diskusi mendalam dengan pengelola ekowisata dan *stakeholder* terkait dan diperkuat dengan hasil FGD serta wawancara mendalam selama riset, jaringan interaksi sosial antar stakeholder di usaha ekowisata G-Pass tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1. Analisis Jaringan Sumber

Stakeholder	Warga Dusun Gedong	Fasilitator	Pengusaha	Pengelola TNGM	Warga tetangga dusun sesama pengembang desa wisata
Warga Dusun Gedong	Ikatan sosial sesama warga cukup kuat, namun adanya G-Pass menimbulkan perbedaan pendapat tentang pengelolaan G-Pass	Sebagian besar warga yakin dengan komitmen fasilitator untuk ikut mengembangkan G-Pass, namun ada warga yang menganggap fasilitator punya agenda tertentu	Hanya mau menerima pengusaha berinvestasi di daerahnya kalau tidak mengubah kondisi desanya	Tidak menyepakati bermitra dengan TNGM karena merasa berat dengan persyaratan bagi hasil yang diajukan TNGM Warga juga khawatir akan merugi setelah melihat desa tetangga yang bermitra dengan TNGM justru menjadi sepi pengunjung setelah harga karcis masuk dinaikkan	Persaingan sesama desa wisata dalam menarik kunjungan wisatawan menyebabkan kompetisi tidak sehat antar desa
Fasilitator (mahasiswa KKN UNS)	Mempunyai komitmen untuk mengembangkan G-Pass sebagai ekowisata berbasis komunitas, namun fasilitator merasa ada warga yang curiga dengan niat baiknya	Tidak semua mahasiswa KKN UNS mempunyai komitmen untuk mendampingi mengembangkan G-Pass, sebagian besar terlibat hanya untuk memenuhi tugas KKN	Hanya mendukung pengusaha sebagai mitra usaha untuk mengembangkan ekowisata berbasis komunitas	Berharap pihak TNGM memberi kemudahan pengembangan konsep ekowisata berbasis komunitas	Tidak memiliki hambatan sosial
Pengusaha	Menawarkan kerjasama pengembangan wisata namun masih mengutamakan maksimalisasi laba	Tidak ada hambatan sosial	Kompetisi antar pengusaha tidak ketat karena sama-sama tidak begitu tertarik dengan ekowisata berbasis komunitas	Cukup banyak pengusaha yang mengembangkan beberapa destinasi wisata di wilayah kontrol TNGM namun dengan model wisata yang cenderung berorientasi laba	Interaksi sama dengan warga dusun Gedong
Pengelola Taman Nasional Gunung	Belum menyepakati ijin pengembangan	Tidak ada hambatan sosial	Telah menjalin kemitraan pengembangan wisata di beberapa	Tidak ada hambatan sosial. Mengijinkan pengembangan	Interaksi sama dengan warga dusun Gedong

Merbabu (TNGM)	ekowisata G-Pass		wilayah pengawasan TNGM	wisata asal tidak merusak lingkungan alam di wilayah TNGM	
Warga tetangga dusun sesama pengembang desa wisata	Persaingan sesama desa wisata dalam menarik kunjungan wisatawan menyebabkan kompetisi tidak sehat antar desa	Tidak ada hambatan sosial	Sebagian besar mempunyai sikap relatif sama dengan warga Dusun Gedong. Hanya sebagian kecil tetangga desa yang sudah mengizinkan industri wisata mengembangkan usaha wisata di wilayahnya	Sebagian besar belum menjalin kemitraan formal dengan TNGM	Meskipun ada persaingan meraih kunjungan wisatawan, namun juga ada kerjasama mengembangkan desa wisata

Sumber : Diolah dari hasil wawancara dan FGD dengan nara sumber

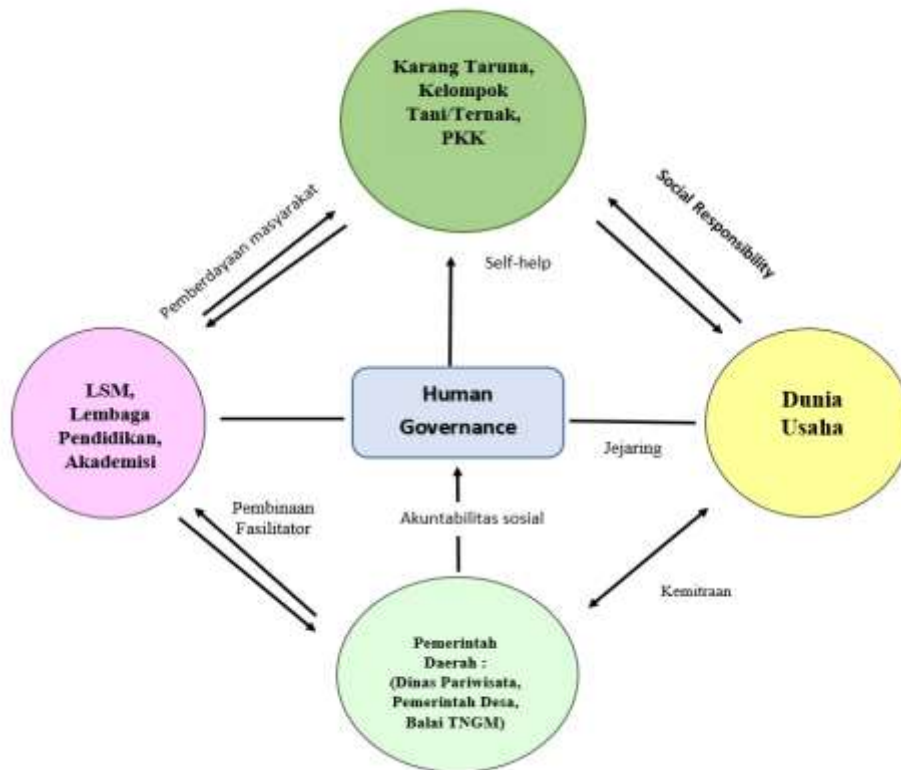
Dari hasil analisis jaringan sosial dan pemetaan jaringan sumber dapat disimpulkan relasi antar *stakeholder* yang lemah ada pada relasi komunitas pengelola desa wisata dengan aparat pemerintah (pemerintah desa dan TNGM) dan pengusaha. Dari hasil diskusi mendalam dan FGD diketahui sumber lemahnya relasi antara warga dusun dengan pemerintah karena tidak adanya saling kepercayaan (*trust*) antara kedua pihak. Pemerintah daerah merasa warga dusun susah diajak kerja sama mengembangkan ekowisata desa, masyarakat dianggap susah diatur dan semaunya sendiri. Sebaliknya, masyarakat menghendaki pemerintah desa menyerahkan pengelolaan ekowisata dipercayakan kepada komunitas desa, pemerintah desa sebagai fasilitator. Hal yang sama juga terjadi pada relasi antara warga dusun dengan pihak TNGM. Masyarakat yang menyadari tentang status area gardu pandang G-Pass yang berada di wilayah TNGM berusaha mendapatkan ijin formal pengelolaan namun merasa syarat yang diajukan pihak TNGM terlalu berat dan akan berdampak meningkatkan biaya masuk ke G-Pass sehingga ditakutkan menurunkan kunjungan wisatawan. Relasi dengan pengusaha yang ingin menanamkan modalnya pada wisata di Dusun Gedong juga belum menemui kesepakatan karena perbedaan motivasi. Masyarakat Dusun Gedong tetap menginginkan pengelolaan ekowisata berbasis kapasitas lokal. Sedangkan investor swasta tentu saja kerja sama yang ditawarkan adalah yang mempunyai prospek mendatangkan laba.

Berdasarkan temuan dari uji coba model, dapat diperoleh gambaran sebenarnya dari model relasi antar stakeholder dalam ekowisata G-Pass adalah seperti berikut :

- a. Relasi yang terbangun cukup kuat antara warga dusun dengan mahasiswa KKN sebagai fasilitator dan pendamping dari LSM, sedangkan relasi warga dengan aparat desa dan pihak TNGM masih lemah, relasi masih bersifat top-down atau pengarahannya, belum berbentuk pemberdayaan atau penguatan kapasitas.
- b. Relasi warga dengan dunia usaha masih sebatas relasi dagang jual beli produk pertanian dan ternak, belum ada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari dunia usaha..

- c. Relasi warga dusun dengan kelembagaan *civil society* terbangun cukup kuat. Kelembagaan *civil society* yakni tim mahasiswa KKN, akademisi dan lembaga masyarakat sebagai stakeholder yang peduli dengan kesejahteraan warga Dusun Gedong, tidak memiliki sumber daya otoritas yang cukup untuk memfasilitasi pengembangan ekowisata di Dusun Gedong. Meskipun demikian stakeholder ini memiliki peran strategis dalam memperkuat pendampingan dan penguatan kapasitas warga desa..
- d. Masyarakat Dusun Gedong - mulai dari level terbawah RT/RW, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani dan tokoh masyarakat - sebagai penerima manfaat langsung aktivitas ekowisata atau stakeholder primer memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan ekowisata G-Pass. Namun belum seluruhnya mampu berkontribusi secara maksimal karena hambatan keterbatasan kapasitas sumber daya maupun modal fisik dan modal sosial.
- e. Antara organisasi masyarakat sipil (LSM, akademisi) dengan lembaga pemerintah dan dunia usaha masih sangat lemah, belum ada jejaring kerjasama yang kuat untuk mengembangkan kemitraan kolaboratif.

Berdasarkan hasil analisis uji coba model maka dilakukan revisi model seperti dalam gambar berikut :



Gambar 2. Model Collaborative Partnership Berbasis Human Governance

Model yang tepat untuk mengembangkan ekowisata berbasis komunitas di Gedong Pass adalah model “Kemitraan Berbasis *Human Governance*” yaitu kemitraan yang digerakkan oleh semangat mengembangkan tata kelola yang mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia khususnya hak warga miskin untuk mendapatkan kesejahteraan. Prinsip kemitraan berbasis *Human Governance*

dikembangkan dari Baggini (2005) antara lain : a) partisipasi, b) pendidikan warga negara, c) akuntabilitas sosial, dan d) keberlanjutan (*sustainability*)

- a. **Partisipasi** : Partisipasi yang dimaksudkan dalam *human governance* adalah partisipasi sebagai alat dan juga tujuan artinya partisipasi menjadi media atau cara untuk mewujudkan tujuan dan sekaligus terbangunnya partisipasi itu sendiri menjadi bagian dari tujuan pembangunan. Indikator partisipasi dalam kemitraan berbasis *humag* adalah penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sipil dan partisipasi efektif dalam program-program pembangunan dan memperluas dan memperkuat jaringan aliansi dengan berbagai *stakeholders*.
- b. **Pendidikan warga negara** : *human governance* mengutamakan pemberdayaan *stakeholders* dalam arti mengembangkan kapasitas sumber daya manusia agar mempunyai kontrol atas sumber daya dan kuasa ekonomi, politik, sosial dalam upaya memecahkan persoalan atau pemenuhan kebutuhan publik. Sumber daya manusia menjadi pelaksana dan sekaligus sasaran kebijakan sehingga mempunyai akses dan kontrol atas keputusan terkait perencanaan program, pelaksanaan atau implementasi dan keberlanjutan program.
- c. **Akuntabilitas sosial** : dalam *human governance* masyarakat bukan sekedar penerima atau kelompok sasaran program, mereka dilibatkan di keseluruhan tahapan program. Karena itu penting sekali adanya masyarakat yang terdidik, masyarakat yang sadar akan peran dan kedudukan mereka dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan publik. Pengembangan ekowisata G-Pass telah menjadi wahana strategis untuk penyadaran dan peningkatan pengetahuan mengelola potensi alam dan kekayaan budaya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Warga Dusun Gedong juga memiliki otoritas untuk menentukan rencana pengembangan wisata sesuai dengan kehendak mereka yang ingin tetap mempertahankan model ekowisata berbasis komunitas. Mereka berani menolak campur tangan pemerintah dan investor swasta yang dikhawatirkan akan lebih berorientasi profit ketimbang kesejahteraan penduduk setempat.
- d. **Keberlanjutan** : program yang berbasis *human governance* bukan program yang insidental atau tipe kebijakan tambal sulam (incremental), tapi program yang berkelanjutan (*sustainable*). Pengelolaan ekowisata yang ditujukan untuk kesejahteraan manusia harus berorientasi jangka panjang. Warga Dusun Gedong menolak tawaran kerjasama baik dari pemerintah daerah maupun bisnis yang dinilai cenderung mengutamakan kepentingan mencari keuntungan ekonomis. Jaminan keberlanjutan akan terpenuhi apabila warga berani menolak penanaman modal dari pihak luar yang hanya akan menguntungkan investor dan menjadikan warga lokal hanya sebagai penonton. Karena itu, model mass tourism cenderung tidak ramah lingkungan sehingga dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan serta kohesivitas sosial di antara warga desa.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis stakeholder dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar terjalin kemitraan kolaboratif perlu dilakukan penguatan relasi antara warga pengelola ekowisata G-Pass dengan pemerintah desa dan pengelola TNGM. Langkah yang bisa dilakukan

adalah melalui penguatan kapasitas modal sosial sehingga bisa terbangun rasa saling percaya (*trust*). Relasi warga dusun dengan aparat desa dan pihak TNGM masih lemah, relasi masih bersifat top-down atau pengarahannya belum pemberdayaan atau penguatan kapasitas. Kelembagaan pemerintah sebagai *stakeholder* kunci (pemegang otoritas) berperan memberikan dukungan pemberdayaan dalam bentuk penguatan kapasitas komunitas lokal maupun sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekowisata *G-Pass*. Bentuk intervensi bagi *stakeholder* kunci adalah peningkatan komitmen politik pejabat daerah untuk menetapkan dasar kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kesejahteraan komunitas setempat. Strategi pemberdayaan masyarakat ini menjadi media yang tepat untuk membangun *trust* di kalangan warga dusun.

2. Lembaga bisnis memiliki sumber daya finansial yang cukup, namun minat pengusaha masih dalam tahap penjajagan karena orientasi mereka masih berat pada orientasi *profit* bukan fokus pada pemberdayaan komunitas lokal. Tindakan yang perlu dilakukan untuk *stakeholder* ini adalah menarik minat mereka pada potensi wisata yang relevan dan kompatibel dengan dunia bisnis, namun tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Langkah yang disarankan adalah mengembangkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat bukan sekadar filantropis atau amal yang bersifat insidental
3. Penguatan kapasitas sosial bisa difasilitasi kelembagaan *civil society* yakni akademisi dan LSM sebagai stakeholder melalui forum temu warga untuk duduk bersama menyamakan persepsi tentang pengembangan ekowisata *G-Pass*. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan kelembagaan *civil society* adalah meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengembangan masyarakat berbasis *human governance*
4. Mengingat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia maupun modal fisik dan modal sosial menjadi faktor penghambat pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Dusun Gedong, maka tindakan yang perlu dilakukan untuk stakeholder primer (khususnya Karang Taruna Dusun Gedong) bukan sekadar mobilisasi tapi dengan memperkuat kapasitas individual, kelembagaan, dan kapasitas modal sosial agar mereka mampu mengelola ekowisata *G-Pass* melalui kekuatan membangun jaringan untuk memperkuat kapasitas dari dalam komunitas sendiri atau membangun kemandirian (*self-help*).
5. Model kemitraan antar stakeholder yang dibangun perlu mengutamakan prinsip penghargaan pada hak dasar warga untuk mendapatkan akses, sarana prasarana serta kebijakan yang mendukung usaha warga mencapai kesejahteraan atau kemitraan berbasis *Human Governance*.
 - a. Dalam model ini relasi pemerintah dengan warga bukan bersifat top down atau komando tapi akuntabilitas sosial dalam bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.
 - b. Relasi dunia usaha dengan komunitas sekitar tempat operasi bisnisnya atau masyarakat pada umumnya bukan hanya relasi produsen-konsumen atau transaksi ekonomi, tapi juga bertanggungjawab pada dampak kegiatan bisnis terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga atau tanggungjawab sosial (*social responsibility*)

- c. Posisi warga pengelola ekowisata adalah menjalin jaringan kemitraan dengan stakeholder bukan untuk sekedar mendapatkan dukungan finansial tapi untuk penguatan kapasitas sosial sehingga mampu mengelola ekowisata G-Pass melalui kekuatan dari dalam atau membangun kemandirian (*self-help*).

REFERENSI :

- Baggini, M. *Human Governance : For a New Culture of Public Administration on the Humanization of Public Administration*. Global Forum on Reinventing Government. Seoul. 2005
- Edi Suharto. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Gray, Barbara., dan Stites, J.P. 2013. *Sustainability through Partnerships: Capitalizing on Collaboration*. Network for Business Sustainability. Network for Business Sustainability.
- Kayser, Thomas. 2014. *True Collaboration Is a Partnership: Six Ingredients for Making It So*. <https://www.linkedin.com/pulse/20140418191855-78767208-true-collaboration-is-a-partnership-six-ingredients-for-making-it-so>. Diunduh 30 Mei 2017.
- Yuliani, Sri dan Humsona, Rahesli. 2021. Collaborative Partnership Untuk Mengembangkan Ekowisata Berbasis Komunitas di Gedong Pass, Kecamatan getasan, Kabupaten Semarang. *Laporan Penelitian Terapan Unggulan Perduruan Tinggi* Kemenristekdikti.

ACKNOWLEDGEMENT :

Risalah kebijakan (*Policy Brief*) ini disusun dari laporan riset skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi yang didanai oleh Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2021

Tim Peneliti :

Dra. Sri Yuliani, M.Si dan Dra. Rahesli Humsona, M.Si – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tim koleksi dan pengolah data :

Achmad Sofiyudin dan Sudrajat Priyo Tamtomo

Foto : Koleksi tim peneliti